



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Imam Bonjol No. 61, Telp. (061) 4510082 - 4510083,
Medan Kode Pos 20157

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 800/255/DISHUB/III/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR : 800/177/DISHUB/III/2023 TANGGAL 09 FEBRUARI 2023 PENETAPAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023 DALAM
RANGKA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** :
- bahwa dengan adanya pelantikan dan perubahan susunan pejabat struktural di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, maka perlu adanya perubahan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan lebih efektif dan efisien;
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran.

- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
 - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan LEMbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Nomor : 9 tahun 2022 Tanggal 28 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
17. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara nomor : 027/16480/2022 tentang Persiapan dan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara TA. 2023
2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023
3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023
4. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/21/KPTS/2023 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk/mengangkat PPTK di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)/Unit SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), meliputi :
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, meliputi :
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK pada SKPD bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 03 March 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Dr. AGUSTINUS, S.Si, MT
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760811 199903 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara;
2. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Peringgal.

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 	4.370.600 781.400.325 1.641.849.000 312.812.496 56.877.920
2	RAMLI SIMAMORA, SE NIP. 19780108 200801 1 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 1. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 	983.239.100 599.143.980
	PENATA TK. I (III/d) KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	599.143.980
3	MUHAMMAD IDRIS, S.SIT NIP. 19771009 200112 1 001	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi 	515.119.176
	PENATA TK. I (III/d) KEPALA BIDANG PELAYARAN			
4	YUNUS PASODUNG, ST NIP. 19680106 199803 1 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Provinsi 1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 	1.000.005.339 599.560.832
	PENATA TK. I (III/d) KEPALA BIDANG ANGKUTAN JALAN	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	599.560.832
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi 	394.014.637

5	ROCHANI LTILOLY, ST. MT NIP. 19710809 199803 2 008 PEMBINA TK. I (IV/b) KEPALA BIDANG PERKERETAAPIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	555.868.522
6	Ir. DAMERIA TAMPUBOLON NIP. 19660507 198803 2 003 PEMBINA (IV/a) KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN UPTD PSP WIL. I BINJAI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.480.000 6.396.386 25.85.822 28.961.100 10.699.000 2.100.000 272.550.000 855.000 200.000.000 730.575.000 76.881.795
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1. Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	7.510.089.370 50.000.000
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	13.757.865.000

7	EDWARD PARLINDUNGAN S, SE NIP. 19860430 201001 1 011	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.600.000
	PENATA (III/c) KEPALA BAGIAN TATA USAHA UPTD PSP WIL. II KABANUAHE	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.751.353
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.585.736
			3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.516.270
			4. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	10.699.000
			5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.950.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.298.625.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	855.000
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.134.000
			3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	767.300.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.058.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1. Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.907.748.720
			2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	100.000.000
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	198.843.000

8	SUHENDRA, SH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
	NIP. 19811015 200801 1 001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70.320.000
	PENATA MUDA TK. I (III/b)		
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.486.420
	UPTD PSP WIL III KISARAN		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.700.819
			3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.194.270
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 10.699.000
			5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.100.000
			6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 185.400.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 855.000
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.134.000
			3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 123.337.500
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 76.460.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 2.049.825.500
			2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 100.000.000
9	LIBERTI HAMONANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
	TAMPUBOLON, ST	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70.320.000
	NIP. 19680105 199803 1 004		
	PENATA TINGKAT I (III/d)		
	KEPALA SEKSI OPERASIONAL PRASARANA DAN SARANA PERHUBUNGAN UPTD WIL IV TARUTUNG	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.842.532
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.921.643
			3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.194.270
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 10.699.000
			5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.100.000

			6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	855.000
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.134.000
			3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.225.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.460.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1. Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.776.849.930
			2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	100.000.000
10	MENSON SEPTO PUTRANTA, SE	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	NIP. 19820928 200604 1 003	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.160.000
	PENATA (ilic)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.486.420
	KEPALA SEKSI OPERASIOANIL PRASANA DAN PRASARANA UPTD WIL V PADANG SIDEMPUAN		2. Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	10.700.819
			3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.194.270
			4. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	10.699.000
			5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.100.000
			6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.400.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	855.000
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.134.000
			3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.225.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.460.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1. Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	448.961.610

11	DESFRIZAL, SE NIP. 19741215 199703 1 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.160.000
	PENATA TINGKAT I (III/d) KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRASARANA PERHUBUNGAN UPTD WIL. VI GUNUNG SITOLI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.947.312 10.921.643 20.171.325 10.699.000 2.100.000 225.600.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.387.500
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	855.000 38.134.000 82.225.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.460.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	565.951.140 100.000.000
12	RONALD MANOTAR TAMBUNAN, SE NIP. 19740321 199703 1 002	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.160.000
	PENATA TINGKAT I (III/d) KEPALA SEKSI LALU LINTAS UPTD ADP PARAPAT	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.489.557 210.406.675 20.194.270

		4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	10.699.000
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.100.000
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.400.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	855.000
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.134.000
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.043.385
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.229.000


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
 Dr. AGUSTINUS, S.SIT, MT
 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 NIP. 19760811 199903 1 003